

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Literasi keuangan merupakan suatu kemampuan dari individu dalam pengaplikasian pengelolaan keuangan baik dalam mendapatkan dan mengevaluasi informasi yang umumnya diperuntukkan untuk mengambil keputusan dengan melihat konsekuensi yang diterima. Literasi keuangan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan perencanaan terhadap keuangan. Literasi keuangan dapat didefinisikan secara luas yaitu sebagai pemahaman akan kondisi keuangan yang dapat mempengaruhi rumah tangga dalam mengambil keputusan secara ekonomi. Literasi keuangan memiliki hubungan yang erat dengan kinerja suatu usaha, informasi finansial berguna untuk mengevaluasi kesuksesan dari keputusan terdahulu dan digunakan untuk menentukan posisi usaha sekarang (Chepngetich, 2016).

Menurut Wibowo (2014) salah satu penyebab kurangnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu dikarenakan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Ketidapahaman akan pentingnya literasi keuangan dapat mengakibatkan kurangnya akses ke lembaga keuangan sehingga mudah dipengaruhi oleh penjual produk keuangan, sehingga hal tersebut tentunya dapat menghambat dalam pembangunan ekonomi negara. Namun pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki pengetahuan keuangan yang cukup atau dikatakan *well literate* (Yuliana, 2013).

Tingkat literasi yang tinggi akan membuat masyarakat menjadi sadar akan pentingnya pengelolaan dan perencanaan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan *saving behavior*. Penggunaan produk keuangan yang sederhana seperti tabungan, kredit dan asuransi akan membantu masyarakat dalam mengelola konsumsi dan meningkatkan investasinya, termasuk investasi di bidang pendidikan dan kesehatan (Lagarde, 2014).

Peran literasi keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan karena turut mempengaruhi perekonomian suatu Negara dalam hal pemanfaatan dan peningkatan sumber daya yang ada. Selama ini keberaksaraan (*literacy*) kerap didaulat menjadi kunci yang mampu membuka pintu bagi datangnya modernisasi, partisipasi, empati, demokratisasi, desentralisasi ilmu pengetahuan, perbaikan taraf hidup terutama ekonomi, serta kemajuan suatu bangsa. Hal ini dianggap bahwa literasi keuangan (*Financial Literacy*) merupakan suatu keharusan bagi tiap individu agar terhindar dari masalah keuangan karena individu seringkali dihadapkan pada *trade off* yaitu situasi dimana seseorang harus mengorbankan salah satu kepentingan demi kepentingan lainnya.

Dalam strategi nasional literasi keuangan Indonesia tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan istilah literasi keuangan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik (OJK, 2013). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perencanaan keuangan adalah cara menjalani kehidupan saat ini sesuai dengan kemampuan keuangan (secara sederhana) dan merancang kehidupan masa depan yang lebih sejahtera.

Berbagai belahan dunia telah melakukan pembahasan mengenai isu literasi keuangan, tak terkecuali negara Indonesia sebagai negara berkembang. Karena persepsi mengenai uang, menjadi alasan penting bagi negara untuk membahas ini secara lebih mendalam. Uang merupakan alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan transaksi dan perdagangan dalam perekonomian. Sehingga peran uang dalam perekonomian juga dapat diibaratkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia jika tidak ada darah, manusia seakan-akan hendak mati. Untuk itu manusia berlombalomba mencari uang dari pagi ke pagi agar dapat memenuhi kebutuhannya. Karena uang memiliki peran penting bagi

perekonomian sehingga tidak hanya sekedar menghasilkan dan menggunakan uang, manusia juga dituntut harus dapat mengelola keuangannya agar tidak terjebak dalam kesulitan keuangan. Oleh karena itu, individu perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang keuangan agar dapat mengelola keuangan secara efektif (www.kompasiana.com, 2015).

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia juga berusaha untuk melakukan edukasi mengenai literasi keuangan. Apalagi diketahui bahwa Indonesia memiliki banyak UMKM sebagai penggerak ekonomi. Hal ini dilakukan karena diketahui bahwa indeks literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh MasterCard (2013), yang mengatakan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia menduduki peringkat ke-14 dan tertinggal jauh dengan Malaysia yang berada pada peringkat 6. Bahkan kondisi ini semakin menurun, ketika salah satu sumber menyatakan bahwa tahun 2020 Indonesia berada dibawah negara tetangga Thailand yang mencapai 82% , serta disusul oleh Malaysia yang mencapai 85% dan Singapura mencapai 98% (Bisnis.com.2020).

Tabel 1. 1 Survei Nasional Literasi Keuangan

	Indeks Literasi Keuangan	Indeks Inklusi Keuangan
2013	21,84%	59,7%
2016	29,7%	67,8%
2019	38,3%	76,19%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Bahkan Indonesia sendiri juga melakukan penelitian terhadap hal ini melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) pertama yang dilakukan OJK pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 21,84% atau seperlima dari penduduk Indonesia yang sudah dikategorikan *well literate* dengan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 59,7%. Kemudian dilakukan kembali penelitian pada tahun 2016, Kepala Subbagian Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK Nizhomy Rahman mengungkapkan bahwa Survei Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan mencatat bahwa Indeks Literasi Keuangan Konvensional telah mengalami peningkatan sebesar 7,86% sehingga menjadi 29,7% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,8%. Pada survei ketiga yang dilakukan pada tahun 2019, OJK menunjukkan Indeks Literasi Keuangan mencapai 38,3% dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19%.

Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/ kabupaten dengan mempertimbangkan *gender* dan strata wilayah perkotaan/perdesaan. Seperti pada tabel 1.2 bahwa berdasarkan strata wilayah, untuk perkotaan Indeks Literasi Keuangan mencapai 41,41% dan Inklusi Keuangan masyarakat perkotaan sebesar 83,60%, sementara Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan masyarakat perdesaan adalah 34,53% dan 68,49%. Hasil survei juga menunjukkan bahwa berdasarkan *gender* Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan laki-laki sebesar 39,94% dan 77,24%, relatif lebih tinggi dibanding Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan perempuan sebesar 36,13% dan 75,15%.

Tabel 1. 2 Survei Otoritas Jasa Keuangan

	Strata Wilayah		Gender	
	Perkotaan	Pedesaan	Laki-laki	Perempuan
Indeks Literasi Keuangan	41,41%	34,53%	39,94%	36,13%
Indeks Inklusi Keuangan	83,60%	68,49%	77,24%	75,15%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Perhatian khusus terhadap literasi keuangan di akibatkan oleh keinginan sebuah negara untuk memiliki penduduk yang berkualitas dan memiliki kecerdasan finansial yang baik, sehingga akan

berdampak pada perbaikan roda ekonomi negara itu sendiri. Apalagi pada saat ini selain kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, manusia modern juga dituntut untuk memiliki kecerdasan *financial*. Sebelum melakukan keputusan pembelian suatu aset, ada beberapa orang yang cenderung mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan aset tersebut tetapi ada juga yang hanya mengikuti insting saja.

Untuk itu pemahaman akan literasi keuangan sangat diperlukan bagi pelaku usaha salah satunya adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), agar UMKM mampu menentukan pilihan dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Literasi keuangan juga membantu UMKM menghindari penawaran pembiayaan yang berindikasi penipuan. Sebaliknya, UMKM dengan tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung merasa sulit untuk membuat keputusan tentang sumber pendanaan serta tidak siap untuk menghadapi permintaan potensi pembiayaan atau menegosiasikan persyaratan dari pembiayaan.

Salah satu ciri dari suatu negara dikatakan sebagai suatu negara yang maju bila jumlah wirausahawanya berada diangka 10% dari total jumlah penduduknya, sementara untuk negara berkembang memiliki standar 2% dari total jumlah penduduknya. Pada suatu kesempatan Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan bahwa angka wirausahawan di Indonesia berada pada 1,65% dari jumlah populasi Indonesia saat ini. Jumlah ini masih sangat jauh bila dibandingkan dengan Singapura sekitar 7%, dan Malaysia sekitar 4%. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan gerakannya yang disebut dengan Gerakan Kewirausahaan Nasional (2015). Dan menurut Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa. Kenapa demikian, karena UMKM merupakan salah satu sektor yang dianggap sangat membantu dalam ketahanan perekonomian negara, dikarenakan UMKM dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Bahkan menurut Kementerian Koperasai dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2011 terdapat 52 juta Usaha Mikro Kecil Menengah yang 60% dari totalnya melibatkan pekerja perempuan.

Di Indonesia kontribusi perempuan sebagai pengusaha khususnya pengusaha UMKM sudah cukup lama berkembang, dimana dapat dilihat dari jumlah pengusaha UMKM perempuan di Indonesia pada tahun 2012 totalnya mencapai 60% dari total pengusaha UMKM, seperti itu dibuktikan pada data berikut:

Tabel 1. 3 Data Pengusaha di Jawa Timur

Jumlah Pengusaha UMKM Perempuan di Jawa Timur	10.000
Kategori Usaha	30% Pengusaha Pemula
	40% Pengusaha Mapan
	30% Pengusaha Menengah

Sumber : IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia),2020

Dengan melihat perkembangan UMKM perempuan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah untuk lebih melirik, membina serta mendukung para pengusaha perempuan terutama

dalam skala UMKM agar eksistensinya tetap diakui dan lebih meningkat. Hampir 10% modal pengusaha UMKM perempuan berasal dari modal mereka sendiri, maka dari itu perlunya dukungan modal dari lembaga keuangan dalam hal ini adalah perbankan bagi pengusaha perempuan, sehingga dapat mengembangkan dan membantu kelancaran usahanya. Berdasarkan data *International Finance Corporation* (IFC), bahwa perempuan memiliki potensi untuk menghasilkan hubungan perbankan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Sekaligus juga dapat dijadikan peluang bagi perbankan untuk mengembangkan produk khusus bagi wirausaha perempuan. Karena pengusaha perempuan merupakan pasar yang sangat potensial bagi bank komersial, mengingat masih banyak yang belum terlayani oleh akses perbankan. Diharapkan pihak perbankan dapat memperluas akses dan fasilitas bagi UMKM perempuan yang melakukan pemberian kredit dan memperluas usaha baik itu usaha dagang maupun usaha ritel.

Tabel 1. 4 Jumlah UMKM di Jember
Menurut Sektor Pertanian dan Non Pertanian Tahun 2016

Sektor Usaha	Lapangan	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
Pertanian		242.380	-	262	242.642
Non Pertanian		175.784	-	1.056	176.840
Jumlah UMKM		418.164	-	1.318	419.482

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data jumlah UMKM di Jawa Timur, bahwa Kabupaten Jember memiliki 647.416 yang terdiri dari berbagai sektor. Meskipun UMKM tersebut lebih didominasi oleh Usaha Mikro yang berjumlah 418.164. Tetapi sektor yang paling banyak dimiliki oleh Kabupaten Jember adalah sektor pertanian dengan jumlah 242.380. Hal ini terbukti, dengan banyaknya jumlah petani yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Jember. Terlebih di beberapa daerah khususnya wilayah selatan Kabupaten Jember, yakni Kecamatan Tempurejo yang merupakan wilayah terluas di Kabupaten Jember dengan luas 524,46 km². Salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tempurejo adalah desa Wonoasri yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani, peternak dan juga buruh. Tetapi bagi perempuan yang tidak memiliki keterampilan bertani atau buruh dan juga tidak memiliki ternak, maka memilih sebagai wirausaha.

Tabel 1. 5 Jumlah Pelaku UMKM Perempuan di Desa Wonoasri Tahun 2019

No	Jenis Usaha	Jumlah Total
1	Pertokoan	47
2	Pedagang Sayur Keliling	37
3	Penyedia Jasa (laundry, salon, penjahit)	25
4	Warung Makan	17
	Jumlah UMKM	109

Sumber : Survei Awal Peneliti (Desa Wonoasri, Tempurejo)

Menurut survei awal peneliti yang telah tergambarkan pada tabel 1.4 bahwa UMKM Perempuan di Desa Wonoasri terbagi dalam berbagai bidang. Yang paling banyak jumlahnya adalah toko kelontong dengan jumlah 47 pedagang, yang menurut peneliti terbagi dalam toko peracangan atau toko sembako, dan toko pakaian. Jumlah terbanyak kedua adalah pedagang sayur keliling sebanyak 37 pedagang. Hal ini disebabkan, mayoritas pekerjaan utama di Desa Wonoasri merupakan petani. Selain kedua jenis usaha tersebut, terdapat penyedia jasa yang terbagi menjadi beberapa jenis

usaha seperti salon, laundry, penjahit yang menurut survei awal peneliti berjumlah 25 jiwa. Warung makan merupakan jumlah yang paling sedikit yang terdapat di Desa Wonoasri, yakni sejumlah 17 jiwa.

Berdasarkan jumlah UMKM Perempuan di Desa Wonoasri ini diharapkan mampu menopang perekonomian daerah. Tetapi apabila diamati, UMKM yang telah berdiri lebih dari lima tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang signifikan, malah cenderung mengalami penurunan. Karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha akan keuangan, sehingga menyebabkan kekeliruan pelaku usaha dalam mengambil keputusan terlebih dalam hal pengelolaan keuangan. Padahal bagi pelaku usaha, kemampuan dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan. Seringkali pelaku usaha meremehkan pentingnya melakukan perencanaan keuangan, laporan keuangan, pemasaran, kegiatan operasi dan transaksi sehingga menyebabkan pada perkembangan UMKM berjalan lambat hingga cenderung mengalami penurunan. Selain permasalahan diatas, berbagai masalah juga menjadi pemicu seperti rendahnya pendidikan, kelembagaan usaha, maupun permodalan yang menjadi faktor pembatas bagi ruang gerak UMKM di Desa Wonoasri.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, terdapat beberapa variabel yang dapat membentuk tingkat literasi keuangan dikalangan UMKM Perempuan Desa Wonoasri yaitu variabel *financial knowledge*, *financial skill*, *financial behavior*, kinerja keuangan dan *financial attitude*. Secara teoritis, *financial knowledge* berarti pengetahuan tentang bagaimana operasi pasar keuangan harus menghasilkan individu yang membuat pinjaman lebih efektif keputusan. Dalam penelitian Kartawinata dan Mubaraq (2018) menurut Develande et al (2008) menjelaskan bahwa pengetahuan keuangan adalah jenis tertentu dari modal awal yang diperoleh dalam kehidupan melalui pembelajaran kemampuan untuk mengelola pendapatan, pengeluaran dan tabungan dengan cara yang aman. Tetapi untuk memiliki *financial knowledge* perlu juga untuk mengembangkan *financial skill*. *Financial skill* merupakan sebuah teknik yang dimiliki seseorang untuk membuat keputusan dalam keuangan.

Selanjutnya terdapat *financial behavior* yang didefinisikan sebagai perilaku manusia yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari (Kholilah dan Iramani, 2013). Perlunya seseorang memiliki kemampuan tentang keputusan keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup sekarang dan untuk masa yang akan datang. Dengan *financial behavior* yang baik ini, dapat menjadi pedoman untuk mengelola keuangan mereka dengan baik.

Selain *financial knowledge*, *financial skill* dan *financial behavior* selanjutnya adalah Kinerja Keuangan merupakan suatu penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standart, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2007:2). Untuk mendapatkan informasi mengenai baik atau buruknya Kinerja Keuangan suatu perusahaan atau badan usaha tersebut, dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan laba rugi, neraca dan arus kas dan berbagai hal-hal lain yang dapat dijadikan ukuran *financial performance* selama beberapa tahun belakangan.

Literasi Keuangan tidak hanya melibatkan pengetahuan dan kemampun mengenai keuangan saja. Tetapi juga terdapat atribut nonkognitif yaitu *financial attitude* yang merupakan unsur penting dalam literasi keuangan. Sikap keuangan dapat diartikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang dipengaruhi oleh keadaan pikiran, pendapatan, dan penilaian seseorang dalam menyikapi permasalahan keuangan. Menurut Hilgert, Jeanne and Sandra (2003), dalam penelitian Susi dan Surya 2017 menyebutkan bahwa perilaku keuangan seseorang akan tampak dari seberapa bagus seseorang mengelola uang kas, mengelola utang, tabungan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Sehingga

dapat diartikan bahwa *financial attitude* mempunyai pengaruh yang positif terhadap aktivitas keuangan seseorang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas terhadap pentingnya akan literasi keuangan yang harus dimiliki seluruh oleh masyarakat, dan juga para pelaku seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dikelola oleh Perempuan. Selain itu juga, Kabupaten Jember yang memiliki jumlah UMKM terbesar di Jawa Timur yang tersebar di berbagai daerah-daerah salah satunya adalah di Kecamatan Tempurejo

Desa Wonoasri sangat menarik untuk di teliti lebih lanjut dengan judul “Analisa Literasi Keuangan Pelaku Usaha Mikro Perempuan di Desa Wonoasri”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menemukan fenomena bahwa pelaku UMKM Perempuan di Desa Wonoasri dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang signifikan bahkan cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan dan akses mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha. Maka dengan begitu peneliti akan melakukan analisis tingkat literasi keuangan pada pelaku usaha mikro perempuan di Desa Wonoasri.

Bagaimana analisa tingkat literasi keuangan pada pelaku usaha mikro perempuan di Desa Wonoasri berdasarkan komponen *financial knowledge*, *financial skill*, *financial behavior*, kinerja keuangan dan *financial attitude*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian mengenai Analisa Tingkat Literasi Keuangan Pelaku Usaha Mikro Perempuan di Desa Wonoasri yaitu, untuk mengetahui tingkat literasi keuangan pada pelaku usaha mikro perempuan di Desa Wonoasri berdasarkan komponen *financial knowledge*, *financial skill*, *financial behavior*, kinerja keuangan dan *financial attitude*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atas penelitian sebagai berikut :

- a. Bagi Pelaku Usaha
Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pelaku usaha khususnya bagi perempuan bahwa pentingnya literasi keuangan sehingga agar lebih termotivasi untuk dapat membuat keputusan keuangan lebih baik.
- b. Bagi Universitas Muhammadiyah Jember
Agar selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk perkembangan penelitian selanjutnya yang sejenis
- c. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.